

**KERJASAMA STRATEGIS UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER
FOR REFUGEES (UNHCR) DAN *NON-GOVERNMENTAL ORGINZATIONS*
(NGOs) DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA
BERDASARKAN PPRINSIP *NON-REFOULEMENT* PADA TAHUN 2016-2021**

**Oleh:
FRIZKA DWI KARTIKA
NIM. 180564201007**

ABSTRAK

Berbagai permasalahan hadir terkait dengan pengungsi di Indonesia, seperti aksi demonstrasi, penolakan dari masyarakat lokal, kepemilikan kendaraan bermotor yang ilegal, dan lain sebagainya. Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, namun Indonesia sebagai negara transit membuka pintu untuk pengungsi. Hal ini karena rasa kemanusiaan Indonesia dan karena adanya prinsip *non-refoulement* sebagai *peremptory norm* yang mengikat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama UNHCR dan NGOs serta tantangan dalam menangani pengungsi di Indonesia berdasarkan prinsip *non-refoulement*. Berdasarkan teori organisasi internasional yang digunakan dalam penelitian ini, penanganan pengungsi di Indonesia melibatkan UNHCR sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat untuk isu pengungsi. Dengan menggunakan konsep kerjasama internasional, penulis melihat perlunya UNHCR untuk bekerjasama dengan NGOs dalam menangani pengungsi di Indonesia dengan harapan adanya perubahan positif terhadap isu pengungsi ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah pentingnya kerjasama antara UNHCR dan NGOs dalam menangani pengungsi. Beberapa NGOs di Indonesia yang turut menangani pengungsi, yaitu SUAKA dan Dompok Dhuafa juga bekerjasama dengan UNHCR, seperti melakukan pemberdayaan, *public awareness*, dan lain sebagainya. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya solusi bagi pengungsi, persepsi negatif, regulasi yang tidak memberikan pengungsi ruang untuk mengakses hak-hak dasar, dan kurangnya edukasi dan literasi masyarakat Indonesia terhadap isu pengungsi.

Kata kunci: Kerjasama, UNHCR, NGOs, Pengungsi, Prinsip *non-refoulement*, Indonesia

**UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) AND
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NGOs)'s STRATEGIC
COOPERATION IN REFUGEES HANDLING IN INDONESIA ON NON-
REFOULEMENT PRINCIPLE IN 2016-2021**

By:
FRIZKA DWI KARTIKA
NIM. 180564201007

ABSTRACT

Various problems exist related to the refugees issue in Indonesia, such as demonstration action, rejection from local communities, ownership of motorized vehicles illegally, and so on. Indonesia is not a country that ratified the 1951 Refugee Convention, however Indonesia as a transit country opens the door for refugees. This caused by Indonesia's humanity and non-refoulement principle as a peremptory norm that binds Indonesia. This study aims to find out the cooperation between UNHCR and NGOs as well as the challenges in refugees handling in Indonesia based on non-refoulement principle. Based on the international organizations theory that uses in this study, refugees handling in Indonesia involves UNHCR as international organization that has a mandate to refugee issue. By using international cooperation concept, researcher sees the need for UNHCR to cooperate with NGOs in refugees handling in Indonesia so there are positive changes to this refugee issue. By using qualitative method, the result of this study is the importance of cooperation between UNHCR and NGOs in refugees handling. Several NGOs in Indonesia that also work for refugees, such as SUAKA and Dompot Dhuafa are also cooperating with UNHCR by doing empowering, public awareness, and so on. However, there are several challenges, such as the lack of solutions for refugees negative perceptions, regulations that does not give space to refugees to access the basic rights, and the lack of education and literation of Indonesian people towards refugee issue.

Keywords: Cooperation, UNHCR, NGOs, Refugees, Non-refoulement principle, Indonesia